



Nomor : 0372/B/C6.34/DM.00.02/2026
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi DKT

18 Juni 2026

Yth. Sekertaris Daerah (Daftar terlampir)

Di

Tempat

Dengan hormat, dalam rangka implemetasi Pasal 28 (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat akan melaksanakan kegiatan **Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman (BSAN) Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya Tahun 2026**

Sehubungan hal tersebut mohon dengan hormat sekertaris daerah kabupaten/kota (daftar terlampir untuk menugaskan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daftar terlampir untuk hadir dan berperan aktif pada kegiatan yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : daftar terlampir

Waktu : 09.00 Wit – Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Sekda (daftar terlampir)

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, mohon untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Membawa Laptop
2. Peserta wajib melakukan registrasi kehadiran pada tautan : <https://s.id/timkerSD>
3. Membawa Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada DIPA BPMP Provinsi Papua Barat T.A. 2025.

Saat ini BPMP Provinsi Papua Barat sedang menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, dimohon bapak/ibu peserta hadir tepat waktu. Untuk kelancaran koordinasi dan

informasi kegiatan dapat menghubungi narahubung PIC BSAN Nur Irja (08124809930) dan Eric Jones Hiarey (0821-9859-4637)

Kepala



Tembusan:

Yustus Awoitauw, S.Si.,M.Pd

1. Sesditjen PAUD Dikdas PNFI
2. Kasubbag Umum BPMP Papua Barat

Lampiran Surat 1

Nomor : 0372/B/C6.34/DM.00.02/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

No	Jabatan	Instansi	Kabupaten/Kota
1	Kepala	Sekertaris Daerah	Manokwari Kamis, 25 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
2	Kepala	Sekertaris Daerah	Manokwari Selatan Selasa, 23 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	

		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
3	Kepala	Sekertaris Daerah	Teluk Bintuni Kamis, 25 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
4	Kepala	Sekertaris Daerah	Teluk Wondama Kamis, 2 Juli 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	

		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
5	Kepala	Sekretaris Daerah	Pegunungan Arfak Selasa, 23 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
6	Kepala	Sekretaris Daerah	Fakfak Kamis, 2 Juli 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

		Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
7	Kepala	Sekretaris Daerah	Kaimana Rabu, 24 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
8	Kepala	Sekretaris Daerah	Kota Sorong Kamis, 25 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	

		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
9	Kepala	Sekretaris Daerah	Raja Ampat Selasa, 23 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
10	Kepala	Sekretaris Daerah	Kabupaten Sorong Rabu, 24 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	

11	Kepala	Sekretaris Daerah	Sorong Selatan Rabu, 24 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
12	Kepala	Sekretaris Daerah	Maybrat Senin, 22 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	
		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	
13	Kepala	Sekretaris Daerah	Tambrauw Senin, 22 Juni 2026
		BAPEDA	
		Dinas Pendidikan	

		Dinas Sosial	
		Dinas Kesehatan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
		Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Unit PPA Polres	
	Ketua	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	
		Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)	
		Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	
		Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)	

Kepala



Yustus Awoitauw, S.Si.,M.Pd

Lampiran Surat 2

Nomor : 0372/B/C6.34/DM.00.02/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

Latar Belakang

Kementerian pendidikan dasar dan menengah memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua artinya kita semua memimpikan bahwa setiap anak Indonesia tanpa kecuali berhak atas layanan pendidikan yang berkualitas, disaat yang sama kita juga menyadari bahwa visi pendidikan bermutu untuk semua mensyaratkan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak, karena sekolah adalah ekosistem social yang sangat menentukan tumbuh kembang anak secara utuh baik secara fisik , psikologis, social, maupun moral. Tanpa rasa aman dan nyaman proses belajar mengajar tidak akan berlangsung secara optimal dan bermakna , atas kesadaran inilah kemendikdasmen menetapkan peraturan menteri no 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman.

Salah satu hal mendasar yang melatar belakangi perubahan Peraturan Menteri ini adalah pergeseran paradigma kebijakan pendekatan yang sebelumnya lebih reaktif menjadi pendekatan yang mengedepankan upaya promotif, preventif dan kolaboratif sebagai bagian dari upaya bersama membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, sekolah tidak lagi diposisikan seolah sebagai ruang penyelesaian pelanggaran setelah masalah terjadi, dan dengan adanya permen baru ini kita mendorong agar sekolah menjadi ruang yang hidup untuk menumbuhkan nilai menguatkan karakter dan mencegah terjadinya kekerasan, perundungan serta berbagai bentuk ketidak nyamanan sejak dini, mengapa demikian karena pemerintah melihat upaya membangun perubahan positif jauh lebih berdampak daripada sekedar menangani masalah dihilir setelah peristiwa terjadi . semangat utama yang diusung dari kebijakan ini adalah memuliakan anak dan seluruh warga sekolah sebagai manusia yang bermartabat setiap anak berhak merasa aman merasa didengar dan dihargai, setiap guru dan tenaga kependidikan berhak bekerja dalam lingkungan yang saling menghormati dan mendukung, oleh karena itu permendikdasmen ini berlandaskan pada 9 asas yaitu humanis, komprehensif, partisipatif,

kepentingan terbaik bagi anak , non diskriminatif, inklusif, berkeadilan, dan berkesetaraan gender, harmonis dan juga berkelanjutan, secara substansial permendikdasmen ini mengatur komprehensif penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual , perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosio kultural hingga etika dan keamanan digital, tentu saja mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman tidak dapat dilakukan dengan sendiri

oleh karena itu regulasi ini menengaskan pembagian peran dan tanggungjawab antara warga sekolah, pemerintah daerah, kementerian pendidikan serta para pemangku kepentingan termasuk pelibatan orang tua masyarakat dan media, pemerintah ingin membangun ekosistem yang saling menguatkan sejalan dengan semangat rukun sama teman, lebih jauh kebijakan ini menekankan pada system dan tata kelola yang bersifat prefentif. Peran Pemerintah Daerah sangat krusial disini terutama pada pembentukan kelompok kerja sebagai simpul koordinasi lintas sector agar penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman dapat berjalan secara terintegrasi, terpantau dan berkelanjutan di seluruh daerah

Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d) Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

- g) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- h) Program Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

Kepala,



Yustus Awoitauw, S.Si.,M.Pd

Lampiran Surat 3

Nomor : 0372/B/C6.34/DM.00.02/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

Jadwal Kegiatan

Waktu (WIT)	Agenda Kegiatan	Penanggung Jawab / Narasumber
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta dan Pengisian Daftar Hadir	Panitia
08.30 – 09.15	Acara Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa 3. Sambutan dan Arahan Sekda Sekaligus Membuka Acara Resmi	Protokol/Seksi Acara & Sekretaris Daerah
09.15 – 10.45	Sesi Pemaparan Materi Pokok: Sosialisasi Komprehensif Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026: Landasan Hukum, Urgensi 4 Pilar Budaya Sekolah, dan Mandat Pembentukan Pokja Kabupaten/Kota	BPMP Papua Barat
10.45 – 12.00	Sesi Panel Lintas Sektor: Tugas Fungsi Pokja, Tata Cara Penanganan Kasus Kolaboratif, Jejaring Rujukan, serta Mekanisme Penganggaran Daerah	Disdik, Dinas PPPA, BAPPEDA, & Kanit PPA Polres
12.00 – 13.00	I S H O M A	Panitia
13.00 – 15.00	Diskusi Kelompok (Desk Forum): 1. Telaah dan Finalisasi Draf SK Pokja BSAN Kabupaten/Kota 2. Perumusan Alur Koordinasi Rujukan & Kanal Pengaduan 3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Seluruh Peserta Forum (Dipandu oleh Fasilitator)
15.00 – 16.00	Penandatanganan Berita Acara Komitmen Bersama	Perwakilan Peserta & Sekda
16.00 – 16.30	Refleksi, Foto Bersama, dan Penutupan Acara	Panitia

Kepala,



Yustus Awoitauw, S.Si.,M.Pd